

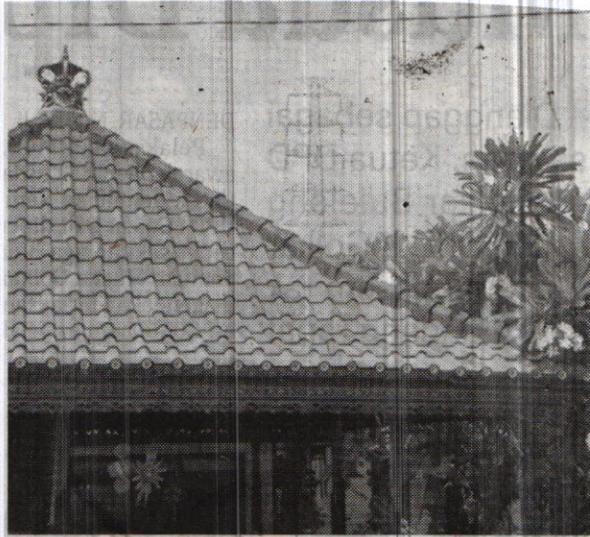


Bukti Transfer Dana Akan Ditelusuri

★ Dewan Datangi Rumah Warga
yang Dilalui Jaringan SUTT



ANGGOTA DPRD Badung saat meninjau rumah warga yang dilalui jaringan SUTT milik PLN, Selasa (10/11).



JARINGAN kabel SUTT yang melintang di atas rumah warga.

Dewan akan segera memanggil pihak PLN untuk dimintai klarifikasi terkait belum cairnya dana kompensasi tiga warga yang rumahnya dilintasi SUTT.

MANGUPURA, NusaBali
Sejumlah anggota DPRD Badung dari Komisi I, Selasa (10/11), mendatangi rumah I Ketut Astika salah seorang warga Banjar Cica, Abianbase, Mengwi yang belum mendapat dana kompensasi proyek pembangunan jaringan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari Celukan Bawang, Buleleng-Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi. Dewan bakal menelusuri bukti transfer dana kompensasi karena dari doku-

Edisi : Rabu, 11 November 2015
Hal : 2



Sambungan - - -

men sudah ada tandatangan Ketut Astika dan dua warga lainnya namun hingga kini mereka belum menerima sepeserpun ganti rugi dari pihak PLN.

Kepada dewan, Astika menegaskan kembali sampai sekarang dirinya belum menerima uang apapun dari pihak PLN sebagai kompensasi, padahal sebenarnya dengan berat hati kabel bertegangan tinggi telah melintang di atas pekarangan rumahnya.

"Saya tidak tahu kenapa hanya tiga orang saja termasuk saya yang belum dapat (dana kompensasi, red). Sementara yang lain tidak ada masalah. Padahal semua persyaratan yang dibutuhkan telah saya lengkapi," keluh Ketut Astika.

Astika pun hanya bisa pasrah dan berharap pihak PLN menepati janjinya. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak PLN, sejatinya kompensasi yang harusnya diterimanya adalah Rp 271.296.000. Sedangkan dua rekan lainnya masing-mas-

ing Ketut Paskalis Muliawan sebesar Rp 190.626.750 dan Ketut Darmawan sebanyak Rp 434.072.250.

Kalangan legislatif Badung dari Komisi I yang turun langsung memantau keberadaan SUTT 150 KV di Abianbase, kemarin, adalah I Made Subawa, I Made Oka Swadnyana dan I Kadek Sudarmaja. Subawa yang bertindak sebagai pimpinan rombongan meminta semua persyaratan untuk pencairan dana kompensasi kepada kepala Lingkungan Banjar Cica, I Nyoman Sunardika. Dokumen-dokumen penting ini, kata dia, nantinya akan dimintai penjelasannya kepada pihak PLN. Menurut rencana dewan akan segera memanggil pihak PLN untuk dimintai klarifikasi terkait belum cairnya dana kompensasi kepada tiga warga tersebut.

Menurut Subawa, mestinya tidak ada alasan tidak mencairkan dana kompensasi untuk tiga keluarga ini sebagaimana yang lainnya. Apalagi segala persyara-

tan seperti penjelasan warga tadi telah terpenuhi. "Ini ada apa?" tanyanya.

Mantan Kadisparda Badung itu berjanji akan menelusuri bukti transfer uang yang diterima warga. Karena dari data yang diperolehnya, dalam sebuah dokumen, dana kompensasi itu sudah ada tandatangan ketiga warga tersebut. Sedangkan uangnya tak pernah diterima sampai sekarang. "Meski sudah ada tandatangan, bukti transfernya kan belum ada. Ini yang akan menjadi dasar kami," tandas Subawa.

Sebelumnya, Manager PLN Mengwi, Wayan Netra, enggan memberikan komentar terkait masalah tersebut. Ia berdalih tidak membidangi jaringan SUTT. "Kami di PLN punya kapasitas pekerjaan yang berbeda. Kalau saya tidak sampai ke SUTT, nanti saya koordinasi dengan teman-teman di proyek, karena yang menangani SUTT adalah P3B (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban)," kilahnya.

Pada Senin (9/11) lalu, warga Banjar Cica, Abianbase, Mengwi mendatangi kantor DPRD Badung. Warga datang bersama sejumlah prajuru desa diantaranya Sekretaris Desa Adat Abianbase, Putu Raka, Petajuh Pawogan Abianbase, Ketut Mulyadi. Menurut, Ketut Mulyadi, yang mendampingi warga, sebelum pembangunan SUTT, telah disepakati dana kompensasi terhadap lahan yang dilintasi. Namun belakangan, mereka yang telah menyetujui pembangunan sampai sekarang justru belum mendapatkan dana kompensasi dari pihak PLN.

Sementara Kepala Lingkungan Banjar Cica, Nyoman Sunardika mengatakan sebetulnya ada 35 lokasi yang mendapatkan dana kompensasi karena dilalui jaringan kabel SUTT, 28 lokasi adalah lahan milik pribadi, empat fasilitas umum, dan tiga tanah ayahan desa. "Cuma kenapa hanya tiga orang saja yang belum dapat. Sementara yang lain sudah cair," ucap Sunardika. **asa**

Edisi : Rabu, 11 November 2015

Hal : 2



Keberadaan Rooftop Masih 'Liar' di Badung

MANGUPURA, NusaBali

Masalah menara telekomunikasi berbentuk rooftop di Kabupaten Badung yang disebut-sebut berfungsi sebagai penguat sinyal statusnya masih 'liar'. Pasalnya, disatu sisi, (SKB) empat menteri yakni, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, memungkinkan pendirian jenis tower ini. Sementara Pemkab Badung disisi lain mengklaim keberadaan tower rooftop belum diatur dalam Perda 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu.

Tarik ulur masalah ini diakui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Badung, I Wayan Weda Dharmaja. Makanya, dalam waktu dekat pihaknya berencana akan kembali melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. "Kami akan konsultasi lagi," ujarnya, Selasa (10/11) kemarin.

Dilain pihak, Weda Dharmaja, juga membenarkan tower jenis rooftop belum masuk sebagai obyek redistribusi. Alasannya karena memang tower yang berkamuflase seperti tandon air tidak diatur secara spesifik dalam perda. Untuk itu, pihaknya mengaku sampai sekarang pun tidak memiliki data pasti berapa jumlah rooftop di Badung saat ini.

"Tower rooftop itu *kan* berfungsi sebagai penguat sinyal. Dan itu memungkinkan melalui SKB empat menteri sepanjang tidak melebihi 6 meter. Tapi masalahnya dalam perda memang dilarang. Karena sudah ada tower terpadu di

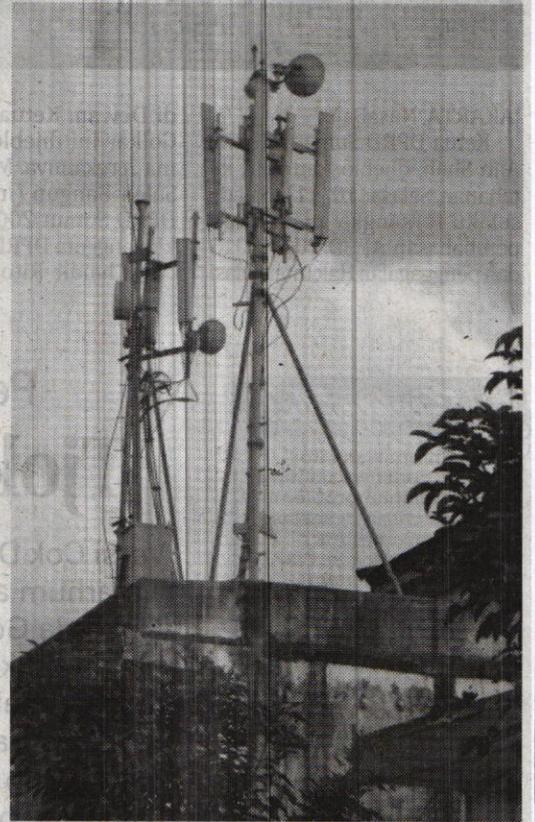
Kabupaten Badung. Inilah yang perlu disinkronkan. Kami berencana akan konsultasi lagi," tegas pejabat asal Sembung, Mengwi.

Ia menduga provider juga mengetahui peraturan tersebut, dan mensiasati agar tower yang mereka bangun tidak melanggar. Sehingga, kata Weda Dharmaja, dari pantauan pihaknya kebanyakan tower rooftop berada di ketinggian tak lebih dari 6 meter.

Lebih jauh dikatakan, terkait legalitas perizinan, pejabat asal mantan Kabag Humas dan Protocol Setda Badung, ini juga mengakui belum diatur dalam perda maupun aturan lainnya. "Tower ini izinya juga tidak ada, karena mengacu pada SK Empat Menteri, rooftop yang di bawah enam meter tidak membutuhkan izin," sebutnya. Ditanya apakah Pemkab Badung berencana membidik redistribusi dari keberadaan tower di bawah enam meter? Ia justru hanya menjawab diplomatis. "Kami *kan* mengarah pada aturan, menyelaraskan aturan dengan SK Empat Menteri," ucapnya.

Weda juga mengaku, keberadaan tower rooftop belum masuk pada pembahasan dalam rapat Pansus Revisi Perda Restribusi Tower. "Inilah yang akan kami masukan pembahasan dalam Perda. Kami masih ada kesenjangan dengan keputusan Empat Menteri, sehingga akan dikonsultasikan lagi," tandasnya.

Ketua Pansus Revisi Perda Restribusi Tower DPRD Badung I Gede Aryanta, menegaskan semestinya tower jenis



• NUSABALI/YUDA

TOWER rooftop yang berdiri diatas bangunan rumah warga, Selasa (10/11).

rooftop atau sejenisnya masuk dalam obyek yang dikenakan redistribusi. "Karena termasuk sebagai obyek yang menunjang keperluan jaringan komunikasi. Sejauh ini tower yang dikenakan redistribusi yang berupa BTS (Base Transciever Station). Jumlahnya di badung saat ini sebanyak 49 titik," katanya. **asa**

Edisi : Rabu, 11 November 2015

Hal : 2



Oknum Perbekel Dituding Sunat Uang Bedah Rumah

TABANAN, NusaBali

Perbekel Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, I Made Arif Hartawan dituding sunat dana bantuan bedah rumah yang dikucurkan Pemprov Bali tahun 2015. Ada delapan orang penerima bantuan bedah rumah di Desa Kebon Padangan, per unit rumah digelontor dana sebesar Rp 30 juta. Isunya Rp 4,5 juta disunat dari ketiga penerima manfaat.

Informasi di lapangan, bantuan bedah rumah untuk 8 penerima di Desa Kebon Padangan itu dikucurkan pada bulan Juli 2015. Masing-masing penerima manfaat mendapat bantuan sebesar Rp 30 juta. Tiga dari 8 penerima bantuan bedah rumah mengaku dana

bantuan yang diterimanya dipotong oknum perbekel. "Alasan pemotongan untuk biaya administrasi" ungkap sumber di lapangan, Selasa (10/11).

Perbekel Desa Kebon Padangan I Made Arif Hartawan saat dikonfirmasi per telepon membantah tudingan itu. Dijelaskan, dana bantuan bedah rumah sebesar Rp 30 juta per penerima manfaat tidak diterima secara utuh. Penyebabnya, ada pajak

PENERIMA BEDAH RUMAH	
Nama	Alamat
I Made Sutawijaya	Galiukir Kaja
I Keut Ardika	Galiukir Kaja
I Made Subagia	Galiukir Kaja
I Dewa Nyoman Sucipta Yasa	Galiukir Kaja
I Nyoman Mega Ariana	Galiukir Kelod
Ni Gusti Ayu Ketut Wakri	Galiukir Kaja
I Nyoman Sudatra	Galiukir Kelod
I Putu Muliana	Galiukir Kelod

ada penyunatan bantuan bedah rumah, tetapi mereka kena pajak," jelas Arif Hartawan.

Dijelaskan, 8 penerima bantuan bedah rumah itu 5 di antaranya berlokasi di Banjar Galiukir Kaja, 3 lainnya di Banjar Galiukir Kelod. Dana bantuan bedah rumah dikucurkan dalam tiga kali termin. Pada termin pertama dicairkan Rp 96 juta, termin kedua, dan ketiga masing-masing Rp 72 juta. "Ada laporannya kok," tegas Arif Hartawan.

Camat Pupuan Putu Arya Suta dikonfirmasi terpisah mengaku tak mendengar isu ada oknum perbekel di wilayah kerjanya menyunat dana bantuan bedah rumah Provinsi Bali. Namun ia mengakui, ada pajak yang menyertai bantuan tersebut. "Kalau isu penyunatan saya belum dengar. Tetapi memang ada pajak yang harus ditanggung penerima manfaat. Untuk lebih jelasnya, konfirmasi langsung ke perbekelnya," saran Arya Suta. k21



• DOK NUSABALI

SALAH satu pengerjaan program bedah rumah bantuan Pemprov Bali di Kabupaten Tabanan.

Edisi : Rabu, 11 November 2015

Hal : 7